

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM



Makalah

Dipresentasikan dalam Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam
Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2)
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Summa

NIM: 80100218081

Dosen Pemandu:

Dr. H. Misbahuddin, M.Ag

Dr. Rahmawati Muin, M.Ag

**PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (nonrenewable), serta yang berbentuk modal alam (natural resource stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (natural resource commodity) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan,

¹ Lihat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *“Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Startegis”*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta; 2006), h. 7, I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Jakarta; Pustaka Prestasi Publisher, 2008)

partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²

Kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan. Oleh karena itu, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan.³ Setiap pelaksanaan pembangunan, akan selalu bersinggungan dengan persoalan eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi yang tidak tepat, kerap kali menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya alam. Kerusakan sumberdaya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumberdaya alam tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.⁴

Ada suatu keyakinan yang datang dari banyak ahli bahwa dahulu seluruh daratan Indonesia nyaris ditumbuhi hutan. Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi didunia. Namun, luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Pada periode 1997-2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar pertahun. Dua kali lebih cepat dibanding tahun 1980. Ini menjadikan

²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

³Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, kajian Filosofis terhadap Undang Undang No 4 Tahun 2009* (Jakarta; PT Rajawali Pers, 2016), h. 26.

⁴Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2.

Indonesia sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi didunia.⁵

Kegiatan ekonomi lahir sejak nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke Bumi oleh Allah swt puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.⁶

Menghadapi persoalan tersebut, mereka mulai menggunakan akalnya untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang produksi. Hidupnya pun tidak lagi berpindah-pindah, tetapi sudah menetap di suatu tempat tertentu dan jumlahnya pun sudah semakin banyak. Kegiatan mereka untuk menjadikan sumber daya alam menjadi barang produksi disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini belum bisa dikatakan ilmu ekonomi, baru taraf pada seni kegiatan ekonomi dan seni ekonomi ini sudah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi ini. Oleh karena banyak problem ekonomi syariah yang dihadapi oleh manusia, maka para ahli piker mulai memikirkan bagaimana cara mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini.⁷

⁵Chafid fandeli, *Bisnis Konservasi Pendekatan Baru (dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 220.

⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 23.

⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1.

Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia, agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pokok dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam dalam Islam?
2. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam dalam Negara?

⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 10.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM ISLAM

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu.⁹ Dalam Islam, sebenarnya Allah membolehkan manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi. Mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam adalah bukan untuk memupuk kekayaan akan tetapi memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia.¹⁰ Sehingga dijelaskan pula dalam QS al-Baqarah/2:60



Terjemahnya:

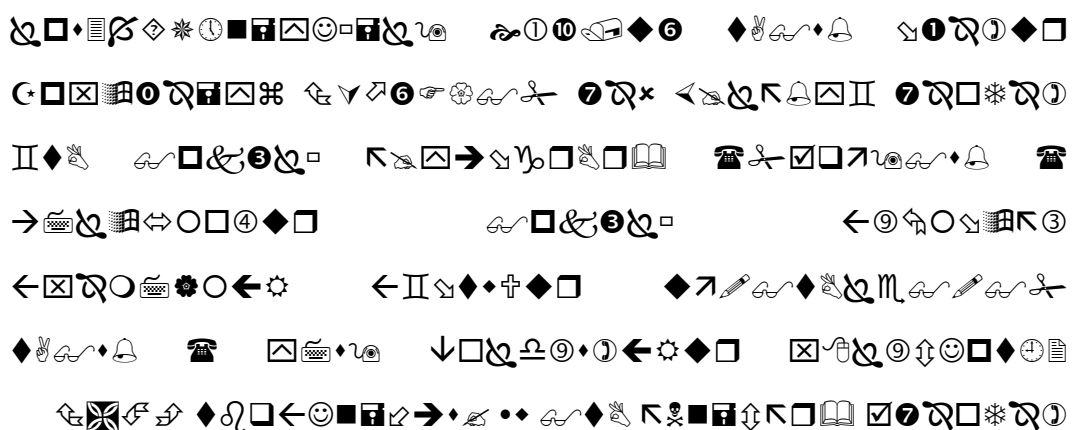
⁹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Samata-Gowa; Alauddin University Press, 2012), h. 37.

¹⁰Mafidatus Sa'adah, *Pendekatan Islam dalam Pengelolaan SDA* “, blogspot.com, 11 Januari 2017. http://mafidaelutmany.blogspot.com/2017/02/v_behaviorurdefaultvmlo.html (13 Oktober 2019).

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”¹¹

Untuk tidak terjadi kerusakan ini peran Negara sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah mesti menegakkan aturan dengan tegas karena sumberdaya alam merupakan common property sehingga boleh dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemimpin sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan dari penciptaannya. (Harun Nasution, 1992: 542). Seperti dalam QS al-Baqarah/2: 30



Terjemahnya:

¹¹Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: Samad, 2006), h. 9.

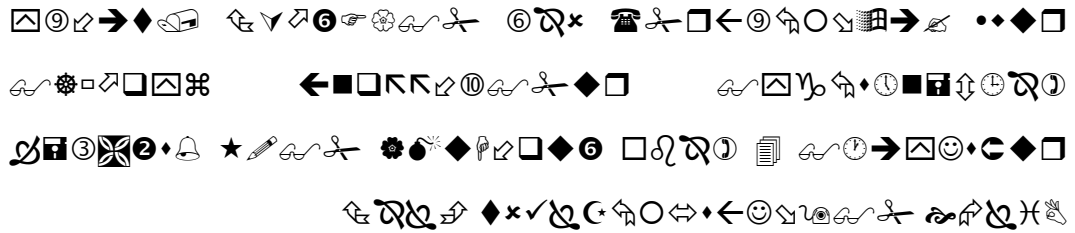
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."”¹²

Sebagai pemimpin, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup).

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengelola maupun memanfaatkannya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Misalnya pasir dan bebatuan yang ada dipinggir sungai merupakan milik ummat manusia dan masing-masing orang berhak untuk mengais dan memanfaatkan pasir dan bebatuan itu sampai ada bukti bahwa pasir dan bebatuan itu adalah milik seseorang.¹³ Allah sudah memperingatkan dalam QS al'A'raf /7:56

¹²Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: Samad, 2006), h. 6.

¹³ Khadim al-Haramain asy-Syarifain Fahd ‘Abd al-Aziz Al-Sa’ud, *Alquran dan terjemahannya* (Cet. I; Saudi Arabiyah: Al-Mujamma, 2002), h. 129.



Terjemahnya:

" Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".¹⁴

Dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional mungkin. Karena, penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Namun, perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan, dan dalam pandangan Islam, hutan dan barang-tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya yang harus dikembalikan kepada oleh rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: Samad, 2006), h. 157.

Dari ayat-ayat al-Quran tersebut, Ahmad Azhar Basyir¹⁵ menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain: *pertama*, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di Bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuknya; *kedua*, Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya; *ketiga*, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. *Keempat*, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi); *kelima*, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah. *Keenam*, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya; *ketujuh*, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial; *kedelapan*, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah; *kesembilan*, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal; dan *kesepuluh*, harta jangan dihabur-hamburkan untuk memenuhi kemikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan *syara'*.¹⁶

B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM NEGARA

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 13-14.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 13-14.

Bumi yang telah dihamparkan oleh Allah swt sebagai salah satu unsur dari susunan sistem tata surya mempunyai luas 510 juta km² yang terdiri seluas 148,5 juta km² dataran (29,12%) dan seluas 361,5 juta km² berupa lautan (70,82%). Allah swt juga telah memberikan pasak bumi berupa gunung berikut padang gembala preiri serta padang pasir seluas 62,1 juta km². Di samping itu, masih terdapat pula cadangan lahan yang belum didiami manusia yang berupa pulau-pulau terpencil dan juga sumber alam yang belum digali di daerah kutub utara dan selatan seluas 12,5 juta km². Unsur sunatullah yang terdapat pada gunung-gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan air kesegala penjuru dunia, serta sebagai perbekalan mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Sebagian besar sumber daya alam ini belum banyak dijamah manusia hingga saat ini.¹⁷

Menurut An-Nabhani (1990), negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Dalam mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syari'at Islam. Dan sektor-sektor pemasukan dan pengeluarannya Kas Baitul Mal, adalah:

1. Kepemilikan individu

Pemasukan dari hasil sumber daya alam kepemilikan individu ini berupa zakat, infaq dan shadaqah. Untuk zakat, dan karena kekhususannya, harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari penghasilan sumberdaya alam yang lain. Dalam pengeluarannya, pemimpin (kepala negara

¹⁷Suroso Imam Zadjuli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 43-44.

dalam pemerintahan Islam) harus mengkhususkan dana zakat hanya untuk delapan pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh alquran (Al-Taubah: 60)¹⁸, yaitu: 1). Faqir, 2). Miskin, 3). Amil zakat, 4). Muallaf, 5) Memerdekakan budak, 6) Gharimin (terlilit hutang), 7). Jihad fi sabilillah, 8). Ibnu sabil (yang kehabisan bekal dalam perjalanannya).

2. Kepemilikan umum

Segala milik umum baik berupa hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan. Pemasukan dari hasil sumber daya alam ini dapat digunakan untuk kepentingan:

- a. Segala Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya ketetenaga kerjaan, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, semua itu dibiayai dari penghasilan sumber daya alam untuk kepentingan tersebut.
- b. Membagikan hasil secara langsung kepada masyarakat yang memang sebagai pemilik sumberdaya alam itu dan mereka berhak untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. pemimpin boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan rakyatnya, seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan sumberdaya, semua itu tidak lepas dari hasil kekayaan sumber daya alam.

3. Kepemilikan negara

¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: Samad, 2006), h. 196.

Hutan tropis Indonesia (tropical rain forest) adalah terluas kedua di dunia setelah kawasan hutan tropis lembah Sungai Amazon di Brazilia. Luas kawasan hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 133 juta hektar, atau sekitar 71% dari luas daratan Indonesia, yang menyimpan keanekaragaman hayati terkaya dan terlengkap (mega biodiversity) di dunia.¹⁹ Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia meliputi lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis satwa mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis. Selain itu, garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan laut yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi berbagai jenis ikan, rumput lamun, dan terumbu karang (coral reef) dalam wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,4 juta metrik ton.²⁰ Indonesia mempunyai 3,9 juta hektar terumbu karang, dengan 70 genus dan 590 spesies karang keras, yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia.²¹ Demikian pula dengan kekayaan minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral tambang yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lainlain merupakan kekayaan alam bumi Nusantara.²²

¹⁹Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2012* (Jakarta; Kementerian Kehutanan, 2013)

²⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Fisheries industry at a glance", Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.

²¹Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, "Future Challenge Fisheries Forum III: Country Report", *Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan* (Sukabumi; Indonesia, 1998). Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang" (World Resources Institute; New York, 2013)

²²Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia* (, Jakarta; ELSAM, 1998). William Ascher, *Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia. Dalam Katja Hujo (ed.) Mineral Rents and*

BAB III

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang sesuai dengan syariat Islam dan dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.
2. Dalam hal ini, Pemerintah harus memanfaatkan sebaik mungkin sumberdaya alam diNegeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumber daya itu. Dan kini Sudah saatnya, misalnya hanya BUMN yang berhubungan

dengan hutan saja yang mengelola hutan-hutang yang ada di negeri ini. Demikian juga dengan sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Aziz Al-Sa'ud, Khadim al-Haramain asy-Syarifain Fahd '. *Alquran dan terjemahannya*. Cet. I; Saudi Arabiyah: Al-Mujamma, 2002.

Azheri, Busyra. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, kajian Filosofis terhadap Undang Undang No 4 Tahun 2009*. Jakarta; PT Rajawali Pers, 2016.

Bachriadi, Dianto. *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia* (, Jakarta; ELSAM, 1998). William Ascher, Mineral Wealth, *Development and Social Policy in Indonesia*. Dalam Katja Hujo (ed.) *Mineral Rents and the Financing of*

Social Policy: Opportunities and Challenges . London ; United Nations Research Initiative for Social Development, 2012.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Fisheries industry at a glance”, *Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Jakarta, 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis*”, *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta; 2006), h. 7, I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Jakarta; Pustaka Prestasi Publisher, 2008)

Basyir, Ahmad Azhar. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.

Fandeli, Chafid. *Bisnis Konservasi Pendekatan Baru (dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Fandeli, Chafid. *Bisnis Konservasi Pendekatan Baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Hutagalung, Chong K. Choi dan Saut. “*Future Challenge Fisheries Forum III: Country Report*”, *Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan*. Sukabumi; Indonesia, 1998. Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding,

Allison Perry., “*Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*” (World Resources Institute; New York, 2013.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2001.

Kehutanan, Kementerian. *Statistik Kehutanan Indonesia 2012*. Jakarta; Kementerian Kehutanan, 2013.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASĪB* Jakarta: SAMAD. 2006.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1997.

Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. Samata-Gowa; Alauddin University Press, 2012.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2011.

Sa'adah, Mafidatus. *Pendekatan Islam dalam Pengelolaan SDA ‘’*. blogspot.com, 11 Januari 2017. <http://mafidaelutsmay.blogspot.com/2017/02/vbehaviorurldefaultvmlo.html> (13 Oktober 2019).

Soemitro, Rachmat. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: BPHN. 1978.

Zadjuli, Suroso Imam. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.